

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki cita-cita adil dan makmur yang mana telah dilaksanakan oleh *founding father* dengan langkah pertama yaitu tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Tujuan tersebut menandakan negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Ciri utama dari negara kesejahteraan adalah munculnya kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya.

Dalam mewujudkan sebuah kesejahteraan negara, pembangunan ekonomi merupakan salah satu wujud nyata pemerintah dalam upaya memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kemajuan bangsa. Pengalaman pembangunan ekonomi Indonesia yang dijalankan berdasarkan mekanisme pasar yang tidak berjalan dengan adil sering menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat. Seiring perjalanan waktu, negara Indonesia tak sekedar menghadapi globalisasi, tetapi juga masalah pengangguran dan masalah pengentasan kemiskinan (*poverty sharing*).

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama ini dinilai belum optimal dalam mengurangi angka kemiskinan. Hal ini terlihat dari data statistik Garis Kemiskinan Menurut Provinsi (Rupiah/kapita/bulan) dalam Angka Tahun 2016, jumlah penduduk miskin di D.I Yogyakarta pada tahun 2015 untuk perkotaan mencapai 359 470 dan pedesaan mencapai 324 386 (Badan Pusat Statistik, 2016).

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang menjual banyak objek wisata, dari segi wisata peninggalan sejarah, wisata alam, juga terdapat wisata seni budaya dan kuliner khas. Apabila berkunjung ke provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di kota Yogyakarta. Di jantung kota tersebut terdapat beberapa usaha kecil mikro yang mengolah beberapa kerajinan tangan hingga oleh-oleh yang rata-rata pembuatannya masih dengan cara manual.

Dalam mewujudkan perekonomian yang kokoh, usaha mikro perlu diberdayakan agar dapat menjadi mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah. Sehingga diharapkan dapat menjadi usaha yang tangguh, unggul, dan mandiri. Sehingga peranan dalam mendorong sektor perekonomian semakin meningkat.

Keberadaan usaha mikro hendaknya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap upaya penanggulangan masalah-masalah yang dihadapi seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan segala aspek yang tidak baik.

Menurut (Lestari, 2006) Usaha mikro mempunyai peran yang penting dalam pembangunan ekonomi, karena intensitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan investasi yang lebih kecil, sehingga usaha mikro lebih fleksibel dalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Hal ini disebabkan karena usaha mikro tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan eksternal, karena dapat mengurangi impor dan memiliki kandungan lokal yang tinggi.

Oleh karena itu pengembangan usaha mikro dapat memberikan kontribusi pada diversifikasi ekonomi dan perubahan struktur sebagai prakondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan, disamping itu tingkat penciptaan lapangan kerja lebih tinggi pada usaha mikro dari pada yang terjadi di perusahaan besar.

Menurut (Partomo & Soejodono, 2004) peranan usaha mikro, kecil dan menengah yang dikaitkan dengan pemerintah hendaknya harus dapat mengurangi tingkat pengangguran yang semakin bertambah disetiap tahun, menanggulangi kemiskinan dengan membantu masyarakat yang kurang mampu dan pemerataan pendapatan yang dapat memperbaiki kehidupan masyarakat yang memiliki keterbatasan khususnya dalam keuangan.

Namun terdapat sebagian besar permasalahan yang dihadapi usaha mikro, seperti masalah permodalan atau *financial*. Modal merupakan bagian yang sangat penting dalam usaha pengembangan suatu bisnis, sedangkan perkembangan modal para pengusaha mikro, hingga kini masih relatif lambat, oleh karena itu

masih sering memerlukan bantuan baik dari pemerintah maupun dari pengusaha besar.

Berdasarkan dari data statistik terakhir D.I.Yogyakarta dalam Angka Tahun 2015 mengalami penurunan, jumlah usaha mikro menjadi 52.907 unit. Padahal di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014 usaha mikro mencapai 73.266 unit (Badan Pusat Statistik, 2016).

Terkait dalam hal tersebut, keberadaan NGO (*Non Government Organization*) atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang sudah lama hadir dalam kehidupan masyarakat Indonesia kini semakin mengakar dan berkembang sehingga mampu berperan cukup besar dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Peran NGO hadir untuk memberikan pelayanan kepada konstituennya tanpa mengharapkan keuntungan bersih dalam pelayanannya.

NGO (*Non Government Organization*) atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) bergerak di beberapa bidang, seperti keagamaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, bahkan rehabilitasi kemanusiaan pasca bencana. Untuk mendanai kegiatannya dan mempertahankan kesinambungan hidupnya, lembaga ini memperoleh modal dari harta kekayaan yang dipisahkan dari para pendirinya, yakni wakaf, hibah, dana program (*grants*) atau dari sumbangan para penyandang dana yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari lembaga tersebut (donatur).

Peran NGO (*Non Government Organization*) atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam pembangunan ekonomi cukup besar misalnya, pada pelaksanaan program-programnya lembaga memberikan pelayanan atau bantuan modal dan pembinaan pada pengusaha mikro yang kesulitan dalam *financial* nya dengan tujuan meminimalisir tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi pengangguran lainnya.

Hal tersebut dapat dikatakan sebuah upaya penyaluran dana secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di jaman Rasulullah saw yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat muslim dari Salim bin Abdullah bin 'Umar dari bapaknya (Umar bin Khatab), bahwasanya Rasulullah pernah memberikan Umar bin Khatab suatu pemberian, lalu Umar berkata yang artinya : *“berikanlah kepada orang yang lebih fakir dari saya, lalau Nabi bersabda*

"Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (kembangkanlah) dan dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu. (HR Muslim) (Al-Asqalani, 1991).

Salah satu NGO (*Non Government Organization*) atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang melakukan pemberdayaan ekonomi dengan memberikan modal usaha dan pembinaan di Indonesia yang saat ini sudah mempunyai kantor cabang di setiap provinsi khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu PKPU *Human Inisiative* dengan nama program KUMM (Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat).

Lembaga non-profit yang dulunya bernama Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Lembaga Kemanusiaan Nasional, sekarang sudah berubah menjadi PKPU *Human Inisiatif* karena saat ini sudah tidak lagi berperan sebagai LAZ, manajemen dalam menghimpun ZISWAF sudah di *spin-out* yang mana saat ini menjadi 2 induk lembaga yaitu Wakaf *Inisiative* dan Inisiatif Zakat Indonesia. PKPU juga sebagai lembaga yang mempunyai kegiatan kemitraan yang bekerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan besar di Indonesia dalam mengelola dana CSR dari beberapa perusahaan tersebut seperti PT. Pertamina Pusat, PT. Telkomsel, PT. Jasa Raharja, dan lainnya.

Adapun program KUMM mempunyai tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang mempunyai usaha-usaha produktif dengan cara mengikat mereka dalam sebuah kelompok melalui pendampingan yang dilakukan secara intensif dengan memberikan pelatihan dan binaan serta memberikan modal kepada sekelompok orang yang menyatukan diri, dalam usaha-usaha di bidang sosial dan ekonomi atas dasar prinsip demokrasi, partisipasi, keterbukaan dan keadilan, yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masing-masing anggota dalam rangka kepentingan bersama, seperti halnya usaha mikro.

Dengan Demikian penulis tertarik meneliti pada PKPU *Human Inisiative* Yogyakarta karena ingin mengetahui dan mendiskripsikan pengelolaan program di PKPU Yogyakarta yang merupakan lembaga swadaya masyarakat swasta yang

berdiri atas dasar semangat kemanusiaan yang menciptakan citra positif dari masyarakat, sukses membuat dua induk lembaga yang mandiri di skala Nasional serta mempunyai kiprah yang sukses dalam kemitraan dan jaringan yang cukup luas hingga mempunyai kantor cabang di 12 negara, seperti Korea Selatan, Jepang, Qatar. Subjek penelitiannya adalah para pelaku usaha mikro kecil menengah binaan KUMM PKPU Yogyakarta. Adapun penulis meneliti para pelaku usaha mikro binaan KUMM PKPU Yogyakarta karena mereka yang merasakan bagaimana dampak dari adanya program tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut maka dalam hal ini penulis akan membahas tentang dampak program KUMM PKPU terhadap kesejahteraan usaha mikro Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah pokok yang akan dibahas, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti berikut:

1. Bagaimana pengelolaan program KUMM (Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat) PKPU Yogyakarta?
2. Bagaimana dampak program KUMM (Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat) terhadap kesejahteraan pelaku usaha mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan pengelolaan program KUMM (Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat) PKPU Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis dampak program KUMM (Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat) terhadap kesejahteraan pelaku usaha mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif ekonomi Islam.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Akademik

Memberikan sumbangan pemikiran untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi

islam yang berhubungan dengan peran LSM dalam kesejahteraan ekonomi serta parameter kesejahteraan pelaku UMKM dalam perspektif islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baru dan lebih mendalam tentang peran LSM dalam kesejahteraan ekonomi dan pemberdayaan UMKM.
- b. Memberikan pertimbangan pada lembaga terkait dalam peningkatan mutu dan sebagai upaya evaluasi untuk kedepannya.

E. Sistematika Penulisan

Salah satu NGO atau lembaga swadaya masyarakat di Yogyakarta yang melakukan pemberdayaan ekonomi dengan memberikan modal usaha dan pembinaan adalah PKPU Yogyakarta dengan nama program KUMM (Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat). KUMM bertujuan Meningkatkan pendapatan kelompok yang mempunyai usaha-usaha produktif dengan cara mengikat mereka dalam sebuah kelompok melalui pendampingan yang dilakukan secara intensif dengan memberikan pelatihan dan binaan serta memberikan modal kepada sekelompok orang yang menyatukan diri, dalam usaha-usaha di bidang sosial dan ekonomi seperti halnya usaha mikro. Dalam hal ini peneliti ingin menganalisis dampak program KUMM PKPU Yogyakarta terhadap kesejahteraan pelaku usaha mikro Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut ini sistematika pembahasannya secara lengkap :

BAB I

Berisi pendahuluan pada bab ini membahas latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan telaah pustaka serta sistematika pembahasan.

BAB II

Berisi landasan teori dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti seperti ruang lingkup lembaga *non-profit*, pengelolaan dana program dan CSR, kesejahteraan dalam perspektif Islam. serta ruang lingkup usaha mikro.

BAB III

Berisi metodologi penelitian dalam bab ini akan diuraikan antara lain mengenai lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, operasional, teknik analisis data.

BAB IV

Berisi hasil penelitian pada bab ini juga membahas tentang analisis menyeluruh atas penelitian yang dilakukan, hasil wawancara yang di deskripsikan secara mendalam hingga tercapai hasil analisis dan penelitian.

BAB V

Berisi penutup pada bab ini membahas kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu juga berisi saran dari penulis yang berhubungan dengan obyek dan tujuan penelitian serta analisis yang telah dilakukan.

